

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN DINAS SOSIAL TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA BATAM

Eka Kartini¹, Dedi Epriadi²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

email: pb171010041@upbatam.ac.id

ABSTRACT

The coaching program implemented by the Batam City Social Service is very important so that street children who live on the streets get their proper place. Through this research, the author aims to find out how the implementation of the guidance carried out by the Social Service and Batam City and to find out the inhibiting factors that affect the implementation of the street children development program in Batam City. Judging from the data obtained, there are several problems from the implementation process, including, the number of street children which is increasing every year, facilities and infrastructure, limited number of employees, and the problem of mentally disturbed children. The method used in this study uses qualitative research with a descriptive approach to obtain relevant and valid data in conducting a study. From this study, the authors involved 9 informants from parties related to the street children development program in Batam City. The Batam City Social Service in implementing the street children development program has implemented it in accordance with the applicable rules, it's just that in the implementation process there are still some obstacles so that the process of implementing street children guidance has not gotten the expected results.

Keywords: Guidance; Implementation; Street Children.

PENDAHULUAN

Program yang dilakukan oleh pemerintah tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Menciptakan masyarakat yang mandiri melalui kreatifitas sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Di Indonesia khususnya masalah kesejahteraan sosial masih menjadi masalah yang belum dapat terselesaikan oleh pemerintah. Permasalahan sosial memang tidak dapat dihindari keberadaannya di masyarakat seperti masalah sosial yang ada di daerah perkotaan. Anak jalanan merupakan Masalah sosial yang berkaitan dengan kebijakan publik yang menjadi sorotan masyarakat yang perlu mendapatkan

perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut seharusnya menggunakan pendekatan pelayanan yang terbuka. Indonesia belum sepenuhnya menyelesaikan masalah anak-anak jalanan, menurut data kementerian sosial jumlah anak Indonesia ada yang tercatat sebagai anak jalanan pada tahun 2019 sebanyak 12.000 anak. (Kompas,2019). Faktor yang menjadi penyebab utama adanya anak jalanan di Indonesia adalah kemiskinan ekonomi keluarga . Selain faktor kemiskinan masih banyaknya anak jalanan yang kurang mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Kemiskinan tersebut membuat seseorang harus menjadi anak jalanan

karena tidak mempunyai tempat tinggal yang bagus dan tidak memiliki kehidupan yang cerah. Selain itu anak dari keluarga miskin yang hidup di jalanan sering menghadapi berbagai resiko tingkat kekerasan sehingga berpengaruh pada tingkat kesehatan mental anak tersebut. Kebijakan dan peraturan tentang anak jalanan sudah di atur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana dalam Undang-undang tersebut menyebutkan seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dari perbuatan diskriminasi, ekonomi, seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, maupun perlakuan yang tidak baik lainnya.

Tabel 1. Jumlah anak jalanan di Kota Batam

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|-----------|
| 1 | 2017 | 193 orang |
| 2 | 2018 | 205 orang |
| 3 | 2019 | 266 orang |
| 4 | 2020 | 334 orang |

Sumber: (Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota batam)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah anak jalanan di kota batam setiap tahunnya semakin meningkat. Pada tahun 2017 berjumlah 193 orang, pada tahun 2018 anak jalanan mencapai 205 orang, dan pada tahun 2019 terus meningkat mencapai 266 orang, kemudian ditahun 2020 semakin meningkat dengan jumlah 334 anak jalanan di kota batam. Dalam mengatasi masalah anak jalanan yang tiap tahunnya semakin meningkat Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mempercepat realisasi program pembinaan anak jalanan tersebut. Selain itu pemerintah Kota Batam juga melakukan Program pembinaan dan Keterampilan terhadap anak-anak jalanan. Selain pembinaan mental, juga dilakukan pembinaan keterampilan, seperti membuat alas kaki, menjahit, dan salon. (Batam Pos, 2015).

Tabel 2. Jumlah anak jalanan yang mendapatkan pembinaan

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|----------|
| 1 | 2019 | 21 orang |
| 2 | 2020 | 40 orang |
| 3 | 2021 | 56 orang |

Sumber: (UPTD-P2PMKS Nilam Suri Dinas Sosial Kota Batam 2021)

Berdasarkan data diatas dapat diliat bahwa dalam proses pembnaaan anak jalanan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hanya saja dalam pelaksanaan program tersebut masih ada beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan dalam pengimplementasian program pembinaan tersebut. Selama proses pembinaan masih ada beberapa kebutuhan seperti sarana dan prasarana, dimana tempat tidur belum cukup memadai. Selain sarana dan prasaran masih ada lagi kedala yang di hadapi seperti seorang anak yang kurang waras, pihak Dinas Sosial kesulitan dalam menganinya, hal seperti ini membuat pihak Dinas Sosial harus berkoordinasi dengan pihak lain terlebih dahulu sebelum dilakukan pembinaan. (Tribun News Batam, 2020).

Karena keterbatasan daya tampung fasilitas dibandingkan dengan jumlah anak jalanan, pada masa lalu pembinaan anak jalanan sulit dilakukan, dan setiap anak jalanan hanya diajarkan beberapa kali. Kemudian dirilis sekali lagi. Hambatan lain untuk menangani anak jalanan adalah kelangkaan prospek karir bagi mereka, meskipun pelatihan keterampilan mereka berulang. Alhasil, setelah mendapat pelatihan pun, anak-anak jalanan itu kembali turun ke jalan. (Riyanda, 2017)

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Kota Batam.

KAJIAN TEORI

Kebijakan bisanya digunakan sebagai acuan untuk membuat aturan pada kehidupan sehari-hari baik dalam segi kehidupan organisasi pemerintahan maupun kehidupan privasi.

Menurut Cgarles O. Jones, istilah kebijakan (policy term) dalam (Anggara, 2012) istilah ini biasanya digantikan dengan tujuan (goals), keputusan, proposal, program, dan graind desaign. Kebijakan ini digunakan untuk menggantikan pendapat atau keputusan yang berbeda dikehidupan sehari-hari.

Menurut definisi Thomas Dye bahwa kebijakan publik adalah upaya sesuatu yang tidak dilakukan atau yang dilakukan oleh pemerintah, alasan mengapa suatu kebijakan harus berguna bagi kehidupan bersama sehingga dapat menjadi pertimbangan yang menekankan dari kebijakan itu sendiri. Yang dapat bermakna besar bagi masyarakat dan tidak meghasilkan kerugian, oleh sebab itu pemerintah harus mengambil kebijakan yang bijak (Anggara, 2012).

a. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Dalam (Anggara, 2014:172-173) Tahap-tahap dalam kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Agenda

Merupakan suatu proses yang realitas dan strategis pada kebijakan publik. Sebuah Isu yang memperoleh status sebagai masalah dan menjadi prioritas dalam agenda publik, isu itu berhak ditempatkan pada sumber daya publik yang lebih dari pada isu lainnya.

Menentukan ide untuk dalam agenda pemerintah sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah.

2) Formulasi Kebijakan

Dalam formulasi kebijakan, masalah yang sudah diterima kemudian dikaji oleh pembuat kebijakan. Hal tersebut untuk meyelesaikan masalah dari berbagai alternatif. Pada tahap ini dicari suatu pemecahan isu tersebut.

3) Legitimasi Kebijakan

Bertujuan memberikan kewenangan pada proses dasar pemerintahan. Warga negara akan mengikuti kebijakan pemerintah guna untuk kedaulatan masyarakat. Warga negara juga harus yakin bahwa tindakan pemerintah adalah

sah. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol-simbol tertentu. dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Pada tahap inilah mencari solusi dalam pemecahan masalah yang sudah disepakati kemudian diimplementasikan. Penemuan-penemuan berbagai kendala sering terjadi dilapangan dan juga biasanya berbeda dengan tujuan dari kebijakan yang sudah dibuat. Maka dari itu haruslah mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.

5) Evaluasi Kebijakan

Pada dasarnya evaluasi kebijakan dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut penilain atau perbaikan dalam suatu adanya kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak (Winarno, 2016)

Evaluasi juga dilihat sebagai suatu kegiatan fungsional. Yang mana tidak hanya dilakukan diawal saja namun juga diakhir dan semua porses yang menyangkut dengan kebijakan.

b. Jenis-jenis Kebijakan Publik

James E. Anderson dalam (Anggara, 2012) adalah sebagai berikut:

1) Substantive and procedural polices

kebijakan dipandang dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya, kebijakan dalam ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya disebut Substantive policy. Sedangkan procedural policy merupakan kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terkait dalam perumusannya (policy stakeholders). Contohnya: undang-undang mengenai pendidikan, yang bertanggungjawab membuat adalah Departemen Pendidikan Nasional. Namun untuk membuatnya harus melibatkan banyak instansi-instansi baik swasta maupun dalam pemerintahan seperti guru, DPR, pegawai negeri dan lain sebagainya.

2) Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies

Distributive policy merupakan sebuah jenis kebijakan yang termasuk dalam pemberian keuntungan/pelayanan pada individu sendiri ataupun kelompok dan

perusahaan. Contohnya, seperti adanya peraturan mengenai tax holiday.

Redistributive policy merupakan kebijakan mengenai suatu pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak pada dalam kebijakan itu sendiri. Contohnya, seperti kebijakan mengenai bebasnya pengurusan tanah untuk kepentingan umum.

Regulatory policy merupakan aturan yang berasal dari kebijakan mengenai pembatasan/pelarangan yang berpengaruh terhadap tindakan-tindakan. Contohnya, peraturan dilarang mempunyai senjata api.

3) Material Policy

Material policy adalah mengatur tentang kebijakan penyediaan sumber material yang nyata bagi penerimanya.

4) Private Goods Policies and Public Goods

Private goods merupakan kebijakan yang digunakan untuk mengatur penyediaan pada pelayanan barang-barang dari pihak swasta untuk kepentingan pribadi pada pasar-pasar bebas dengan diberikan imbalan biaya tertentu disebut dengan Substantive policy. Public goods policy merupakan sebuah aturan yang menghimbau adanya ketersediaan barang atau pelayanan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan orang banyak.

2.1. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Anggara, 2014) implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok, baik itu pejabat pemerintah maupun pejabat swasta untuk mencari tujuan kebijakan dari hasil kesepakatan bersama.

Implementasi adalah usaha yang dilakukan oleh orang yang membuat kebijakan itu dan berharap akan menghasilkan tujuan secara bersama. Maka dari itu, untuk mengevaluasi sebuah keberhasilan kebijakan diperlukan suatu implementasi yang baik oleh pembuat kebijakan dan disepakati bersama.

2.2. Indikator Implementasi Kebijakan

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2014) Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat beberapa indikator sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tingkat keberhasilan ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat praktis dengan kondisi sosial budaya pada tingkat pelaksana kebijakan dapat digunakan untuk menilai kinerja implementasi kebijakan. Tidak mungkin terwujud bila skala dan tujuan kebijakan terlalu ideal.

2. Sumber daya

Sumber daya yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik, maka dari itu dibutuhkan kemampuan yang baik untuk mengimplementasikan kebijakan. Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan atau tidak berhasilnya suatu kebijakan. Sesuai dengan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kebijakan yang ditetapkan secara apolitis, setiap level implementasi memerlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Komunikasi

Individu harus memahami tujuan standar agar kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (pelaksana). Yang bertanggung jawab terhadap kebijakan adalah mereka yang harus saling berkomunikasi tentang standar dan tujuan kebijakan tersebut kepada para pelaksana sehingga kebijakan tersebut tidak lari dari standar kebijakan yang ingin dibuat. Informasi yang diterima dari berbagai penyedia informasi kepada pelaksana yang menjadi norma dan tujuan harus konsisten dan seragam.

4. Disposisi Atau Sikap

Sikap penerimaan atau penolakan para pelaksana kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan

yang ada tidak dikembangkan oleh warga lokal yang akrab dengan masalah dan kesulitan yang mereka hadapi. Disposisi, memiliki tiga macam respon yang mampu mempengaruhi kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan suatu kebijakan. pertama, pendalaman, pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu kebijakan, kedua, arah tanggapan mereka apakah menerima, netral atau menolak, dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

5. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Besarnya kontribusi lingkungan eksternal terhadap efektivitas kebijakan publik adalah faktor terakhir yang harus dievaluasi ketika mengevaluasi kinerja implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan bisa gagal karna adanya iklim sosial, ekonomi, dan politik yang buruk yang dapat berpengaruh pada implementasi kebijakan itu sendiri.

2.3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono dalam buku Hukum dan kebijakan publik, (Sunggono, 2012:149-153) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1. Isi Kebijakan.

Masih kurangnya ketidakjelasan dalam isi kebijakan yang dapat membuat kegagalan dalam kebijakan, karena apa yang seharusnya menjadi tujuan tidak cukup jelas dan tidak terurai secara jelas dan program-program kebijakan tersebut sepenuhnya terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

2. Informasi Implementasi

Informasi dalam Kebijakan publik sangat berperan penting. Karena dalam informasi pemegang peran yang terlibat langsung harus memiliki sumber informasi yang perlu atau sangat berkaitan agar dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi mengenai ini sama sekali tidak ada misalnya akibat adanya gangguan informasi dalam komunikasi.

3. Dukungan Pelaksanaan

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses

pengimplementasian kebijakan harus memiliki dukungungan dari berbagai pihak pelaksana yang cukup banyak untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Pembagian Potensi

Sebab serta akibat yang membuat tidak berhasilnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi pada para pelaku yang terlibat dalamnya. Dalam hal ini berhubungan dengan diferensiasi tugas dan wewenang pelaksanaannya. Struktur dalam organisasi dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang tidak sesuai dengan pembagian tugas.

2.4. Penelitian terdahulu

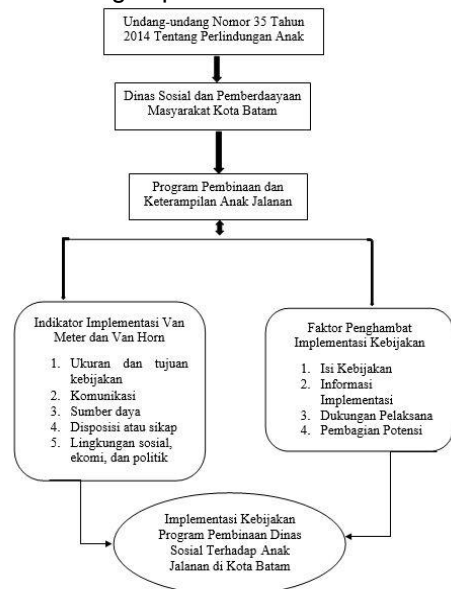
Penelitian yang dilakukan oleh Herlina Astri, yang berjudul Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia, Faktor penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang. Yang dimuat pada jurnal Masalah-masalah Sosial Vol 5 Tahun 2014, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, latar belakang adanya anak jalanan ini terjadi dikarenakan oleh faktor penyimpangan kepribadian mereka yang disebabkan oleh kemiskinan ekonomi dari keluarga mereka. Faktanya sebagian besar anak jalanan berasal dari anak-anak dari keluarga miskin, hal inilah yang menjadi penyebab utama adanya anak jalanan. (Astri, 2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Lulu Gumanti yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Di UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS Dinas Sosial Kabupaten Cirebon). Yang dimuat pada jurnal Publik volume 8 Nomor 1 tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan program pembinaan oleh di Dinas Sosial Cirebon sudah dilaksanakan secara efektif tetapi sepenuhnya belum maksimal masih

banyak yang harus di perbaiki lagi seperti sumber daya manusia yang masih kurang, komunikasi antar dinas dengan pihak sebenarnya masih kurang dan belum terlalu ketatnya penjagaan sehingga berpotensi memungkinkan anak tersebut kabur. (Gumanti, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Pas, Badrun Kartowargiran yang berjudul Evaluasi Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan yang dimuat pada Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi Volume 6, No.1, June 2018 (36-49). ISSN: 2502-1648 (online). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kebutuhan anak jalanan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial DIY belum maksimal Mengembalikan anak sebelum mendapatkan bimbingan yang mendalam kemungkinan bagi anak untuk kembali ke jalan. Hal ini dikarenakan belum adanya bimbingan mendalam yang memberi kesadaran kepada anak untuk tidak lagi kembali ke jalan. Oleh karena itu, banyak anak yang kembali ke jalanan setelah dikembalikan ke orang tua. (Agustinus Pas, 2018)

2.5. Karangka pemikiran



Gambar 1. Karangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian ini digunakan karena untuk menyajikan data secara faktual dan akurat tentang fakta-fakta yang ada dilapangan. Pendekatan ini digunakan karena untuk mendapatkan kebenaran yang termasuk dalam penelitian ilmiah. Penelitian ini dibangun atas dasar teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik (Sugiono, 2015) Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggali fakta mengenai implementasi program pembinaan oleh dinas sosial khususnya pada anak jalanan di kota batam.

Dalam penelitian ini, penulis didukung oleh dua jenis data yang digunakan menurut (Sujarweni, 2021:73) yaitu:

1. Data primer

informasi yang diperoleh dari berbagai pihak dengan secara langsung untuk digunakan sebagai narasumber dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang mempunyai informasi dan data adalah pegawai Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota batam, pegawai UPTD P2PMKS Nilam suri, satpol PP dan anak jalanan.

2. Data sekunder

Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber secara tidak langsung seperti buku, jurnal, literature dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

(Gunawan, 2013:141) secara umum terdapat tiga macam teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. **Observasi:** merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi tempat yang ingin diteliti guna untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti oleh penulis. Peneliti melakukan observasi dengan secara langsung datang ke Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Batam, UPTD-P2PMKS Nilam Suri tempat dilalukan pembinaan anak jalanan di Kota Batam.

2. **Wawancara:** merupakan interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertukar informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut. wawancara ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dan terstruktur. Wawancara semi terstruktur di dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Peneliti melakukan wawancara kepada Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, pegawai UPTD-P2PMKS Nilam Suri, Satpol PP, serta anak jalanan.
3. **Dokumentasi** Adalah catatan serangkaian aktivitas yang telah terjadi. Bentuk dokumentasi biasanya seperti gambar, arsip foto, video, audio, dan lainnya. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat fakta dan bukti yang telah diperoleh dilapangan agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sebuah implemetasi kebijakan diperlukannya transparansi dan responsibilitas agar suatu kebijakan tersebut berjalan dengan lancar. Implentasi dapat dilaksanakan dengan adanya perencanaan sebelumnya. Kota Batam merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Seiring berjalannya waktu dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di kota batam membuat lapangan pekerjaan di kota Batam semakin sulit, sehingga banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan banyaknya anak-anak terlantar yang disebabkan oleh krisis ekonomi.

Melihat dari sudut pandang ekonomi di kota batam, Dinas Sosial membuat rancangan yang berguna untuk kesejahteraan anak jalanan dengan membuat program-program pembinaan anak jalanan di kota batam, sehingga dengan adanya program tersebut dapat merubah pola pikir anak jalan yang dulunya kurang baik menjadi pola fikri yang positif yang berguna bagi pemerintah kota batam. Untuk mengukur sebuah implementasi kebijakan berjalan berjalan dengan baik dan tidaknya dapat diukur dari indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Adapun indikator yang digunakan dalam implementaasi kebijakan program Dinas sosial terhadap anak jalanan di kota batam sudah berjalan dengan baik atau tidak yaitu indikator Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Anggara, 2014) sebagai berikut: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, disposisi atau sikap, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi harus jelas maksud dan tujuannya apa yang ingin dicapai. Ketika ukuran dan tujuan suatu kebijakan terlalu ideal maka akan sulit untuk di implementasikan. Untuk program pembinaan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tujuan dari program tersebut agar dapat mengurangi jumlah dari para anak jalanan itu sendiri. Hanya saja dalam proses pengimpelemntasian nya sulit untuk direlisasikan karna masih ada kendala-kendala yang di hadapi sehingga sulit untuk mendapatkan hasil yang di inginkan.

2. Sumber daya

Sumber daya dalam impelementasi kebijakan memiliki peran penting agar kebijakan itu dapat terealisasikan. Sumber daya dalam proses impelementasi program pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Batam masih kukurangan dari segi sumber daya

manusia sendiri serta sarana dan prasara. Seperti untuk anak-anak yang perlu tenaga ahli khusus dibidangnya belum ada tenaga ahli untuk pembinaan anak tersebut daaan kurangnya fasilitas yang memadai sehingga tidak sebanding dengan jumlah anak jalanan yang tiap tahunnya semakin meningkat.

3. Komunikasi

Merupakan penyampaian informasi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berpengaruh terhadap proses pembinan anak jalanan. Penyampian informasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam kepada para staff yang terlibat sudah berjalan dengan baik. Begitu pula komunikasi yang disampaikan oleh para petugas UPT derngan anak-anak jalanan yang mendapatkan pembinaan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam penyampain informasi tersebut.

4. Disposisi atau sikap

Sikap para pelaksana program pembinaan anak jalanan sudah sangat mendukung baik dari Dinas sosial dan pemeberdayaan masyarakat kota batam maupun staff yang ad di UPTD-P2PMKS Nilam Suri. Dalam pelaksanaanya, Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat kota batam serta semua pihak pelaksanaan memiliki kemampuan yang cukup baik dari segi pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap program pembinan anak jalanan tersebut. Hanya saja respon dari anak jalanan ini masih banyak yang tidak menerima sehigga program pembinan tersebut belum berjalan secara efektif.

5. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Dalam sebuah impelementasi kebijakan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sangat berperan penting. Program pembinan anak jalanan untuk lingkungan sosial sendiri terkait pembinaan anak jalanan sangat mendukung, dengan adanya kerja sama dari pihak-pihak terkait seperti lembaga sosial, lembaga pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Untuk lingkungan ekonomi dan politik sendiri Dinas sosial dan pemerdayan

masyarakat kota batam turut berperan aktif untk mensejahterakan anak jalanan agar anak jalanan ini tidak kembali lagi kejalanan. Para anak jalanan yang sudah mendapatkan pembinaan diberikan dana untuk membantu perekonomian anak tersebut. Hanya saja setelah selesai dibina anak tersebut kembali lagi kejalanan karna pola pikir anak yang sulit untuk berubah.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Batam Menurut Bambang Sunggono dalam buku Hukum dan kebijakan publik, (Sunggoo, 2012:149-153) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1. Isi Kebijakan

Isi kebijakan merupakan faktor yang sangat penting dalam impelementasi suatu kebijakan itu sendiri. Dalam pengimpelementasinya masih ada hambatan seperti sarana dan prasarana serta anggaran yang belum memadai dalam proses pembinaan anak jalanan.

2. Informasi Implementasi

Informasi yang berikan Dinas Sosial Kota Batam untuk pembinaan anak jalanan sudah berjalan secara maksimal namun untuk informasi dalam keterampilan sendiri, anak jalanan belum di sosialisasikan secara keseluruhan sehingga menyebabkan program tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

3. Dukungan Pelaksana

Dukungan dari para instansi terkait tentang pembinaan anak jalanan tersebut tidak ada penolakan dalam impelementasinya akan tetapi penolakan di lakukan oleh orang anak itu sendiri sehingga membuat anak tersebut kembali lagi kejalanan.

4. Pembagian Potensi

Dalam pembagian potensi pembinaan anak jalanan yang sudah di impelementasikan oleh Dinas Sosial sudah baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa implementasi kebijakan program pembinaan dinas sosial terhadap anak jalanan di kota batam sudah baik tetapi belum maksimal,. Simpulan yang peneliti peroleh dari bab sebelumnya adalah:

1. Program pembinaan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sudah berjalan dengan baik. Anak jalanan diberikan pembinaan serta keterampilan yang dapat mengasah pola pikir dan skill anak sehingga selesai dilakukan pembinaan anak tersebut tidak kembali lagi kejalanan.
2. Untuk mensukseskan program tersebut Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sudah bekerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, KPAI, BNN, Kejaksaan, dan Polda. Hanya saja respon dari anak jalanan tidak menerima sehingga program pembinaan anak jalanan ini sulit mendapatkan hasil yang maksimal.
3. Program pembinaan anak jalanan sudah dilaksanakan hanya saja masih ada kendala yang dihadapi seperti: sarana dan prasarana yang belum memadai, anak yang mental nya terganggu belum ada petugas yang khusus untuk membina anak tersebut, sumber daya manusia yang masih kurang, anggaran yang belum cukup memadai dan pelatihan-pelatihan keterampilan yang belum dilaksanakan untuk anak jalanan sehingga sulit untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2012). *Perbandingan administrasi negara*. Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

- Agustinus Pas, B. K. (2018). Evaluasi Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan. *Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi Dan Aplikasi*, 6.
- Astri, H. (2014). berjudul Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia, Faktor penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berprilaku Mneyimpang. *Masalah-Masalah Sosial*, 5.
- Batam, T. news. (2020). Bina Anak Jalanan di UPT Nilam Suri, Dinsos Batam siapkan bapak asuh. Retrieved March 3, 2021, from <https://batam.tribunnews.com/2020/03/03/bina-anak-jalanan-di-upt-nilam-suri-dinsos-batam-siapkan-bapak-asuh>
- Batam Pos. (2015). Keren, Anak Jalanan Diberi Pelatihan Keterampilan.
- Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. (2020). Retrieved from <https://dinsospm.batam.go.id/>
- Gumanti, L. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Di UPT Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS Dinas Sosial Kabupaten Cirebon). *Publik*, 8.
- Gunawan. (2013). *Metode penelitin kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kompas. (2019). Anak Jalanan Masih Terabaikan.
- Riyanda, R. (2017). Kebijakan Program Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan (Kajian Kasus Di Beberapa Daerah). *Dialektika Publik*.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2021). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunggono, B. (2012). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: sinar grafika.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Caps Publishing.